

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abbas, Syahrizal., *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Arikunto, Suharsimi., *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Brannen, Julia., *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Hasan, Iqbal., *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Hasibuan, Malayu.S.P, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Ibrahim, Johny., *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia, 2008.
- Lumban, Tobing, G. H. S., *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*. Jakarta: Erlangga, 1999.
- Mangesti, Yovita. A., & Tanya, B. L., *Moralitas Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- Margono, Suyud., *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Meleong, Lexy. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mulyana, Ded., *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Notodisoerjo, R. Soegondo., *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*. Jakarta: Raja Grafindo, 1993.

Sarjono, dkk., *Panduan Penulisan Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, 1987.

Soekamto, Soerjono & Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2001.

Sjaifurrachman, & Adjie, H., *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: CV Mandar Maju, 2011.

Usman, Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.

Ulya., *Metode Penelitian Tafsir*. Kudus: Nora Media Enterprise, 2010.

Waluyo, Bambang., *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Winata, Frans Hendra., *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.

Yusuf, M., *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group, Cet. II, 2015.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek voor Indonesie

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77), diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 1986.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084)

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6084)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 mengenai Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, diundangkan di Jakarta pada 25 Januari 2015.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2019

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris, diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Maret 2021.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), diundangkan di Jakarta, pada 20 agustus 2019.

Peraturan Perkumpulan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penjabatan Tugas dan Kewenangan Mahkamah Perkumpulan.

C. Internet

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2024). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Diakses pada 29 Mei 2024 dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

Ikatan Notaris Indonesia. (2024). *Sejarah Ikatan Notaris Indonesia*. Diakses pada 19 Mei 2024 dari <https://iniipatbali.id/index.php/tentang>

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023, *Perbedaan Mediator, Arbiter, Konsiliator*, <https://fahum.umsu.ac.id/perbedaan-mediator-arbiter-dan-konsiliator/>.

D. Tesis

Rizani, Raisa, “Penyelesaian Sengketa Dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia tentang Pemilihan Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia Periode 2016-2019 Oleh Mahkamah Perkumpulan”, Thesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum UGM, 2018.

E. Skripsi

Kaju, Kornelius Pius Siprianus, “Penyelesaian Sengketa Pertanahan melalui Proses Mediasi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang”, skripsi, Sarjana Terapan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2013.

F. Jurnal

Aditya Revano, “Kewenangan Mahkamah Perkumpulan Dalam Penyelesaian Sengketa Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan tinggi DKI Jakarta Nomor 752/PDT/2018/PT.DKI), Indonesian notary, volume 2, nomor 38, bulan September tahun 2020.

Dira Putri Widyari, efisiensi alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi perdata, jurnal ilmu hukum, volume 1, nomor 2, bulan Januari tahun 2024

Rosita, Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi), *Journal Of Islamic Law*, Volume VI, Nomor 2.

Caroline Maria M dan Harjono. *Studi Kajian tentang Gugatan Intervensi dalam Perkara Perdata*. Jurnal Verstek. Vol. 8, No. 1, 2020.

Djumardin, “Mediasi Sebagai Pilihan Penyelesaian Sengketa”, *Jurnal Hukum Jatiswara*, vol. 3, Tahun 2015.

G. Wawancara

Wawancara Dengan Burhan Albar, Selaku Notaris Dari Pihak Kongres, Pada Juli 2024.

Wawancara Dengan Ikhsan Lubis, Anggota Mahkamah Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, Pada 30 September 2024.

Wawancara Dengan Taufiq, Ketua Bidang Organisasi Ikatan Notaris Indonesia, Pada 12 November 2024.

Wawancara Dengan Agung Herning, Selaku Ketua INI Kabupaten Sleman, Pada 04 November 2024.

Wawancara Dengan Thoyyib Hadi Fansyuri, Selaku Sekretaris Majelis Kehormatan Notaris dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta Pada 5 November 2024.

Wawancara Dengan DW, Notaris Dari Daerah Pihak KLB, Pada 21 Oktober 2024.

Wawancara Dengan Notaris RM, Selaku Notaris Dari Wilayah KLB, Pada 24 Oktober 2024.